

# SEKILAS APBN

## Budget Issues Quick Response

### NELAYAN MENJERIT, PENYALURAN SUBSIDI MASIH SAJA BELUM EFEKTIF

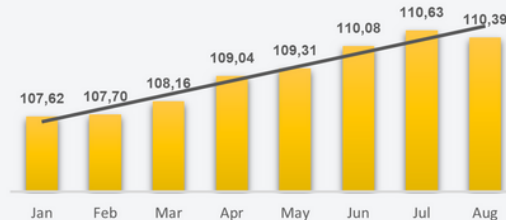
A. Miftahul Ahirah, Ruth Angelia Densiska,  
Adethia Shafarianti, Annisa Khoirullah, Roni Winner



Percepatan dan ketepatan dalam distribusi solar bersubsidi untuk nelayan menjadi permasalahan yang terus berulang dari tahun ke tahun. Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang mencapai 107,21% juga tidak menggambarkan kesejahteraan nelayan, dikarenakan Indeks harga yang dibayar nelayan terus mengalami kenaikan.

Sebelum terjadi kenaikan harga BBM, para nelayan sudah membayar Rp7.000-Rp10.000/liter untuk solar bersubsidi dikarenakan ketersediaannya yang langka dan harga tersebut akan meningkat di tengah kenaikan harga BBM. Kementerian BUMN dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI mencoba menjawab persoalan tersebut melalui pengadaan Pertashop untuk menjangkau desa-desa nelayan.

Gambar 1. Indeks Harga Yang Dibayar Nelayan



Sumber: BPS

Tetapi, pemerintah perlu memperhatikan beberapa permasalahan berikut, **Pertama** dalam Perpres No. 191 Tahun 2014 dijelaskan bahwa nelayan yang memperoleh solar bersubsidi adalah kapal yang bermuatan <30 GT. Namun pada kenyataannya, banyak kapal kecil yang bermuatan <10 GT tidak mendapatkan subsidi, karena subsidi habis terserap oleh kapal bermuatan besar. Hal ini semakin diperparah oleh permasalahan **kedua**, yaitu jatah BBM bersubsidi nelayan sebesar 2,2 juta kl/tahun hanya diterima sebesar 18% atau hanya sebesar 400.000 kl/tahun oleh nelayan. Selain itu, permasalahan **ketiga** yang semakin memperlangka solar bersubsidi adalah terbatasnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), yang berjumlah hanya 388 unit dari 11.000 desa nelayan sehingga membuat nelayan harus membeli solar melalui pengecer, karena adanya larangan pembelian solar menggunakan jerigen di SPBU. Permasalahan **keempat**, masih banyak pelabuhan kecil yang tidak terdata oleh Pemerintah menjadi tempat bersandar para nelayan-nelayan kecil.

Melihat berbagai permasalahan yang terjadi, pengadaan Pertashop tersebut harus berfokus untuk menangani permasalahan distribusi solar kepada nelayan-nelayan kecil yang selama ini tidak menerima subsidi tersebut. Diperlukan data penerima subsidi yang lebih tepat agar penyaluran subsidi solar pun dapat lebih efektif. Misalnya, dengan pendirian dan pengelolaan Pertashop melalui Koperasi Desa Nelayan yang dapat menjadi wadah untuk mendata nelayan-nelayan kecil. Data tersebut nantinya dapat dijadikan acuan untuk menetapkan jumlah subsidi solar serta lokasi yang tepat untuk penempatan Pertashop tersebut. Selain itu, diperlukan adanya percepatan skema regulasi baru, di mana penerima subsidi dari Pertashop haruslah kapal-kapal kecil yang bermuatan <10 GT sehingga kelangkaan solar bagi nelayan-nelayan kecil dapat diminimalkan.